



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR *16* TAHUN 2018

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah-Daerah;
8. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia Nomor KEP/62/XII/2016 tentang Penetapan Nomor Register Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

5. Sekretaris DPRD;
6. Inspektur;
7. Kepala Dinas;
8. Kepala Badan;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Kepala Kantor;
12. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
13. Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.

c. Pimpinan Instansi Vertikal.

- (2) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf G);
 - b. nomor polisi/registrasi (angka);
 - c. kode/seri akhir wilayah (huruf D); dan
 - d. berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kendaraan dinas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kategorikan kendaraan dinas operasional dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dinas 4 (empat) digit.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- a. untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran Instansi Vertikal yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI PEMATANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pematang
pada tanggal 4 April 2018

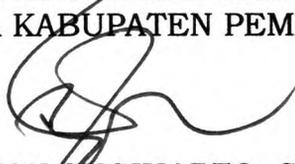
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMATANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMATANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
 KENDARAAN DINAS JABATAN DI KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
 KENDARAAN DINAS JABATAN DI KABUPATEN PEMALANG

| NO | NOMOR POLISI | NAMA JABATAN |
|-----|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | G 1 D | BUPATI PEMALANG |
| 2. | G 2 D | WAKIL BUPATI PEMALANG |
| 3. | G 3 D | KETUA DPRD PEMALANG |
| 4. | G 4 D | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG |
| 5. | G 5 D | KETUA PENGADILAN NEGERI PEMALANG |
| 6. | G 6 D | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG |
| 7. | G 7 D | KETUA PENGADILAN AGAMA PEMALANG |
| 8. | G 8 D | WAKIL KETUA DPRD PEMALANG |
| 9. | G 9 D | WAKIL KETUA DPRD PEMALANG |
| 10. | G 10 D | BUPATI PEMALANG |
| 11. | G 11 D | INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG |
| 12. | G 12 D | WAKIL KETUA DPRD PEMALANG |
| 13. | G 13 D | ASISTEN PEMERINTAHAN |
| 14. | G 14 D | ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 15. | G 15 D | ASISTEN ADMINISTRASI |
| 16. | G 16 D | STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK |
| 17. | G 17 D | BUPATI PEMALANG |
| 18. | G 18 D | STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN |
| 19. | G 19 D | STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 20. | G 20 D | SEKRETARIS DPRD |
| 21. | G 21 D | DANDIM 0711/PEMALANG |
| 22. | G 22 D | KAPOLRES PEMALANG |
| 23. | G 23 D | KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 24. | G 24 D | KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 25. | G 25 D | KEPALA DINAS KESEHATAN |
| 26. | G 26 D | KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 27. | G 27 D | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 28. | G 28 D | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 29. | G 29 D | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | NOMOR POLISI | NAMA JABATAN |
|-----|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 30. | G 30 D | KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 31. | G 31 D | KEPALA DINAS TENAGA KERJA |
| 32. | G 32 D | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| 33. | G 33 D | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 34. | G 34 D | KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 35. | G 35 D | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN |
| 36. | G 36 D | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 37. | G 37 D | KEPALA DINAS PERTANIAN |
| 38. | G 38 D | KEPALA DINAS PERIKANAN |
| 39. | G 39 D | KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 40. | G 40 D | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 41. | G 41 D | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 42. | G 42 D | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 43. | G 43 D | KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
| 44. | G 44 D | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| 45. | G 45 D | BUPATI PEMALANG |
| 46. | G 46 D | KEPALA KANTOR IMIGRASI |
| 47. | G 47 D | KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PEMALANG |
| 48. | G 48 D | KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 49. | G 49 D | KEPALA KANTOR KESBANG |
| 50. | G 50 D | DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI |
| 51. | G 51 D | KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |
| 52. | G 52 D | KEPALA BAGIAN HUKUM |
| 53. | G 53 D | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| 54. | G 54 D | KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN |
| 55. | G 55 D | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 56. | G 56 D | KEPALA BAGIAN ORGANISASI |
| 57. | G 57 D | KEPALA BAGIAN UMUM |
| 58. | G 58 D | KEPALA BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 59. | G 59 D | CAMAT PEMALANG |
| 60. | G 60 D | CAMAT TAMAN |
| 61. | G 61 D | CAMAT PETARUKAN |
| 62. | G 62 D | CAMAT COMAL |

| NO | NOMOR POLISI | NAMA JABATAN |
|-----|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 63. | G 63 D | CAMAT AMPELGADING |
| 64. | G 64 D | CAMAT BODEH |
| 65. | G 65 D | CAMAT ULUJAMI |
| 66. | G 66 D | CAMAT BANTARBOLANG |
| 67. | G 67 D | CAMAT RANDUDONGKAL |
| 68. | G 68 D | CAMAT WARUNGPRING |
| 69. | G 69 D | CAMAT MOGA |
| 70. | G 70 D | CAMAT PULOSARI |
| 71. | G 71 D | CAMAT BELIK |
| 72. | G 72 D | CAMAT WATUKUMPUL |
| 73. | G 86 D | KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG |
| 74. | G 98 D | SEKRETARIS DAERAH |
| 75. | G 99 D | KETUA DPRD |

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002